

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

Fidelia Inexcelsis In Richardus

NPP. 31.0780

*Asdaf Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur*

*Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email : [chelsyrich81@gmail.com](mailto:chelsyrich81@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** Basic Health Research in 2018 released epidemiological data stating that in Southeast Asia 14.4 million infants are stunted, and in 2022 Indonesia ranks 2nd highest globally with the highest stunting prevalence rate in Asia. Stunting is a condition where a baby's height and weight do not match the age criteria based on indicators set by WHO and place NTT as the province with the highest stunting rate in 2022. Based on data reported by e-PPGBM, Sikka Regency is one of the priority areas in stunting reduction in NTT due to the trend of stunting prevalence which increased by 1.5% from the previous year and Nita District became a District with a regular increase in stunting rates over the last 3 year. **Purpose:** This study aims to know the Implementation of Stunting Prevention Policies in Nita Subdistrict, Sikka Regency. **Method:** In this study, the author used qualitative research methods through data collection techniques, namely interviews, observations and documentation. **Result:** Through implementation theory according to George Edward III which is divided into 4 dimensions, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, the author sees how the implementation of Sikka Regent Regulation Number 19 of 2019 concerning Stunting mitigation in the Regions runs. There are 3 indicators in the dimension of policy implementation that show that stunting reduction policies Nita District is said to be successful, namely seen from inter-sectoral cooperation and the use of village funds for the allocation of stunting funds and the existence of binding rules/laws. **Conclusion:** Cross-sectoral cooperation is one of the important roles in the success of stunting reduction policies in Nita District, Sikka Regency so that based on the results and discussions the implementation of stunting reduction policies goes well, implemented in accordance with procedures even though mutual participation from target communities is still very minimal.

**Keywords:** Stunting, nutritional status, PMT.

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang:** Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 mengeluarkan data epidemiologi yang menyatakan bahwa di Asia Tenggara 14,4 juta bayi mengalami *stunting*, dan pada tahun 2022 Indonesia menempati urutan ke 2 tertinggi secara global dengan angka prevalensi *stunting* tertinggi se-Asia. *Stunting* adalah suatu kondisi dimana tinggi badan dan berat badan bayi tidak sesuai dengan kriteria umur berdasarkan indikator yang ditetapkan dari WHO dan menempatkan NTT menjadi provinsi dengan angka *stunting* tertinggi tahun 2022. Berdasarkan data yang dilaporkan e-PPGBM, Kabupaten Sikka menjadi salah satu daerah prioritas dalam penanggulangan *stunting* di NTT disebabkan tren prevalensi *stunting* yang naik sebesar 1,5 % dari tahun sebelumnya dan Kecamatan Nita menjadi Kecamatan dengan kenaikan angka *stunting* secara berkala selama 3 tahun terakhir. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Melalui teori implementasi menurut George Edward III yang terbagi menjadi 4 dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi penulis melihat bagaimana implementasi Peraturan Bupati Sikka Nomor 19 Tahun 2019 tentang penanggulangan *Stunting* di Daerah berjalan. Terdapat 3 indikator dalam dimensi implementasi kebijakan yang menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan *stunting* yang dilaksanakan di Kecamatan Nita dikatakan berhasil yaitu dilihat dari kerja sama antar lintas sektor dan penggunaan dana desa untuk alokasi dana *stunting* serta adanya aturan/ hukum yang mengikat. **Kesimpulan:** Kerja sama antar lintas sektor merupakan salah satu peran penting dalam keberhasilan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sehingga berdasarkan hasil dan pembahasan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* berjalan baik, dilaksanakan sesuai dengan prosedur walaupun partisipasi timbal balik dari masyarakat target sasaran masih sangat minim.

**Kata Kunci :** *Stunting*, status gizi, PMT.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Masalah kekurangan gizi kronis atau *stunting* merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang dihadapi di dunia, khususnya pada negara-negara miskin dan berkembang (Candra MKes(Epid), 2020). *Stunting* menjadi permasalahan penting karena berkaitan dengan peningkatan risiko terjadinya kemiskinan dan kematian, perkembangan otak yang tidak optimal yang

mempengaruhi motorik dan pertumbuhan mental yang terhambat. Hasil data epidemiologi yang dilakukan oleh Riset Kesehatan Dasar menyatakan pada tahun 2018 di Asia Tenggara terdapat 14,4 juta balita mengalami *stunting*. Pada tahun 2022, Indonesia berada pada urutan ke 2 tertinggi secara global dengan angka prevalensi *stunting* se – asia setelah India. *Stunting* merupakan suatu kondisi dimana panjang atau tinggi serta berat badan pada balita tidak sesuai dengan kriteria yang seharusnya dimiliki pada umur tersebut ( rentang umur 2 tahun – 6 tahun ) dengan umur anak pada balita akibat kurangnya gizi kronis sejak 1000 hari pertama kehidupan, namun akan baru terlihat setelah bayi berumur 2 tahun ke atas yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dan dilakukan perbandingan menggunakan standar WHO, dimana pengklasifikasian berdasarkan indikator dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010: 1. Sangat Pendek : Zscore < - 3,0. 2. Pendek : Zscore.-3.0 sampai dengan Zscore < -2,0 (Kabupaten Sikka, n.d.). *Stunting* dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) memberikan dampak yang besar pada kualitas sumber daya manusia di masa yang datang karena menyebabkan terlambatnya pertumbuhan fisik anak hingga terhambatnya perkembangan kognitif yang mempengaruhi pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak ketika dewasa. Selain itu juga, anak *stunting* ketika dewasa akan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular (UNICEF Indonesia, 2022).

Pada tahun 2022, sebanyak 25 kota/kabupaten menjadi sasaran deteksi dini dan perujukan kasus *stunting* dengan prevalensi yang tinggi, bersamaan dengan komitmen politik yang tinggi dalam menanggulangi gizi buruk pada anak. Hal ini menjadi tonggak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama dalam mendeklarasikan gerakan nasional Aksi Bergizi dengan perluasan yang masih terus berlanjut di 130 kabupaten/kota. Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi *stunting* pada balita di Indonesia menjadi 14% di tahun 2024. Dalam mendukung upaya pencegahan *stunting*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menetapkan 8 Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* yang tercantum dalam buku Petunjuk Teknis

Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten / Kota oleh Bappenas yakni: (1). Analisis situasi; (2). Rencana Kegiatan; (3). Rembuk *Stunting*; (4). Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran Desa; (5). Pembinaan KPM; (6). Sistem Manajemen Data; (7). Pengukuran dan Publikasi *Stunting*; (8). Reviu Kinerja Tahunan. Aksi Integrasi dilaksanakan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penanggulangan dan penurunan *stunting*, dimana hal tersebut membutuhkan perubahan pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor dengan harapan agar dapat digunakan oleh keluarga yang menjadi sasaran rumah tangga 1.000 HPK (Kemendagri RI, 2020). Berdasarkan data dari SSGI (*Materi Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022*, n.d.) angka *stunting* mengalami penurunan dari 24,4 % di 2021 menjadi 21,6 % di 2022. Walaupun mengalami penurunan, tetapi perlu penurunan 3,8 % per tahun untuk mengejar target 14 % di tahun 2024 dengan 10 Provinsi angka *stunting* tertinggi nasional 2022 yaitu NTT, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 35,3 %. Hal ini menjadi perhatian utama terkhususnya pemerintah Provinsi NTT terkait penanggulangan *stunting* bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat diatasi dengan cepat. Salah satu kabupaten di Provinsi NTT yang memiliki komitmen dalam penanggulangan *stunting* adalah Kabupaten Sikka, yang saat ini berupaya secara serius dalam penanggulangan *stunting*. Kabupaten Sikka merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas dalam penanganan *stunting* dikarenakan berdasarkan data yang dilaporkan e-PPGBM Provinsi NTT pada tahun 2023 menyatakan kabupaten Sikka menjadi salah satu kabupaten yang mengalami tren kenaikan presentasi *stunting* dari tahun 2022 sebesar 13,8% menjadi 15,3% di tahun 2023 setelah Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab *stunting* yang tinggi di Kabupaten Sikka di antaranya pola asuh anak bermasalah, dimana sebagian anak *stunting* memiliki orang tua yang sibuk bekerja menjadikan anak sehari-hari di asuh oleh nenek atau dititipkan pada tetangga; permasalahan dalam

pola pemberian makanan pada anak yang tidak sesuai standar dikarenakan ketidakmampuan para orang tua dalam memenuhi gizi anak yang cukup baik sejak dalam kandungan hingga pada 1000 HPK dikarenakan rendahnya pendapatan keluarga serta kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi anak. Hal ini menyebabkan tingkat kecukupan protein pada anak kurang. Kemudian terdapat permasalahan dari sanitasi lingkungan yang kurang bagus dan akses terhadap air bersih susah memicu terjadinya gangguan saluran pencernaan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita yakni keadaan ekonomi dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Nita ter data tahun 2023 yaitu sebagai petani dengan persentase sebesar 49,75 %, selain itu juga akses pendidikan mayoritas penduduk di Kecamatan Nita hanya sampai pada tamatan SD/Sederajat, menjadikan terbatasnya akses terhadap informasi yang diperoleh oleh masyarakat berkaitan dengan gizi yang tepat serta sumber daya finansial yang kurang dalam mendukung terciptanya pola makan yang sehat serta bergizi.

Kurangnya peran masyarakat secara aktif pada program penanggulangan *stunting* menjadi salah satu kendala yang saat ini masih terjadi. Masyarakat kurang terdorong untuk ikut berpartisipasi dalam program penurunan *stunting*, hal ini dikarenakan sebagian orang tua anak penderita *stunting* sibuk bekerja didasari kekurangan ekonomi mengakibatkan anak sering kali dititipkan ke orang tua asuh yakni pada tante, om, nenek dan seterusnya sehingga pola asuh yang diberikan kepada anak pada saat dititipkan tidak maksimal menyebabkan pemberian gizi tidak optimal, bahkan beberapa di antara mereka mengalami kekerasan fisik dan mental. Sama halnya ketika sosialisasi diadakan, banyak orang tua anak penderita *stunting* yang tidak hadir ketika sosialisasi dikarenakan sibuk untuk bekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terlebih lagi banyak orang tua yang tidak mempunyai sumber penghasilan yang tetap sehingga berdampak pada pengetahuan orang tua yang terbatas terkait masalah kesehatan, terutama tentang kebutuhan gizi pada anak.

Selain itu, beberapa daerah di Kecamatan Nita memiliki akses yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan beberapa sebab seperti jalan yang masih belum beraspal dan tidak terhubung dengan transportasi utama sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Selain itu juga berimbas pada terkendalanya para pelaksana kebijakan dalam memberikan akses layanan kesehatan dan gizi, pemantauan dan evaluasi langsung kepada masyarakat.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Anggara Setya Saputra., dkk. (2022) Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga (Anggara Setya Saputra et al., 2022) menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang lemah termasuk masalah kemiskinan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan angka *stunting* di Purbalingga. Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kabupaten Purbalingga juga mencoba mengolaborasikan program kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk menanggulangi *stunting*.

Penelitian dari Febiayu Rahmanda (2022) Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pagar Jati (Rahmanda, 2022) bahwa pada unsur *input* yakni ketersediaan SDM dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program 1000 HPK di Puskesmas Pagar Jati masih kurang memadai. Pada prosesnya, pemeriksaan antenatal care (ANC) terlaksana dengan baik, sedangkan untuk pemantauan pertumbuhan balita, pemberian imunisasi, pemberian makanan tambahan, dan penyuluhan *stunting* terlaksana dengan cukup baik. Pada unsur output sebanyak 8 dari 10 indikator capaian program telah mencapai target. Perlu dilakukan peningkatan program penanggulangan *stunting* yang maksimal di Puskesmas Pagar Jati, peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pencegahan *stunting* juga sangat diperlukan.

Penelitian dari Farhan Damara (2022) Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur (Damara, 2023) Implementasi Kebijakan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Sampang telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini didasarkan pada data *stunting* yang dimiliki oleh Kabupaten Sampang pada tahun 2022 yaitu 6.97%. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang untuk menyukseskan implementasi kebijakan penurunan *stunting* di Kabupaten Sampang dengan adanya beberapa inovasi yang diberikan, dengan maksud untuk dapat mengedukasi masyarakat terkait masalah *stunting* dalam rangka pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting* ini.

Penelitian dari Virginia Elvira Dey Putri (2023) Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang (Elvira Dey Putri, 2022) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *stunting* telah berjalan optimal menurut beberapa dimensi yang dikemukakan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian. Salah satu saran peneliti pada indikator – indikator implementasi kebijakan adalah membangun rumah posyandu dan melakukan pemeliharaan rutin.

Penelitian dari Nabila Udzrotu Shauma., dkk ( 2022 ) Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022) menyatakan bahwa Pelaksanaan implementasi kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang masih belum berjalan dengan optimal. Sumber daya manusia masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas para pelaksana khususnya yang berada di tingkat bawah. Karakteristik organisasi pelaksana belum terpenuhi dengan baik masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, tanggapan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, namun pemahaman pelaksana dalam menjalankan kebijakan masih kurang. Komunikasi dan koordinasi antar OPD yang berada ditingkat bawah masih kurang, sehingga masih terdapat kegiatan dalam pencegahan *stunting* yang tidak tepat sasaran. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi

dan lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi.

Penelitian dari Luciana Febriyanti., dkk. (2023) Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Lampahan Kabupaten Bener Meriah (Febriyanti & Harahap, 2023) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan penangkalan serta penindakan dalam penyusutan *stunting* telah dicoba dengan baik cocok dengan peraturan wilayah Bupati Kabupaten Bener Meriah No 15 tahun 2020 Tentang Penangkalan serta Penindakan *Stunting* Terintegrasi, namun masih belum optimal dalam mensosialisasikan kepada warga tentang bagaimana metode penangkalan serta penindakan *stunting*. Ada pula sebagian program yang dicoba dalam penangkalan serta penindakan *stunting* di daerah kerja puskesmas Lampahan lewat pendekatan intervensi khusus serta intervensi sensitif yang diperuntukkan kepada anak seribu hari awal kehidupan( 1000 HPK), yang dicoba oleh Puskesmas Lampahan semacam pemberian tablet tambah darah buat bunda berbadan dua, melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini( IMD), membagikan ASI Eksklusif serta membagikan ASI penuh hingga umur 24 bulan didampingi oleh pemberian santapan pasangan ASI( MP-ASI), melaksanakan imunisasi bawah lengkap, sediakan obat cacung serta membagikan oralit buat penangkalan serta penyembuhan diare.

Penelitian dari Amanda Mirasherly., dkk. (2023) Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah terkait Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bulungan (*Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional Dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bulungan - CORE Reader*, n.d.) menyatakan bahwa penurunan *stunting* dapat terjadi jika ada komitmen dari pemerintah daerah. Dalam studi kasus Kabupaten Bulungan, peneliti menemukan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan pendampingan terpadu oleh kader, edukasi berkelanjutan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan strategi melalui penguatan



infrastruktur dan fasilitas kesehatan, pendekatan terhadap faktor budaya, dan pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini dilakukan berfokus pada Kecamatan Nita di Kabupaten Sikka yang belum banyak diteliti secara mendalam terkait dengan penanggulangan *stunting*, sehingga memberikan wawasan serta kontekstual yang baru yang didapatkan dengan penggunaan data empiris terbaru yang dikumpulkan melalui wawancara serta observasi di lapangan serta analisis mendalam. Peneliti juga mengeksplorasi partisipasi serta peran masyarakat lokal dalam pelaksanaan kebijakan *stunting* yang memberikan perspektif baru mengenai keterlibatan kelompok dalam program kesehatan yang dijalankan

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, serta menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian partisipatif dengan desain penelitian bersifat fleksibel atau adanya kemungkinan untuk diubah sesuai dengan rencana yang telah dibuat, menyesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lokasi penelitian (Simangusong, 2017). Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari partisipan yang relevan dalam konteks yang relevan melalui wawancara, observasi, dan studi kasus. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan bersifat deskriptif, yang artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara serta didukung oleh catatan lapangan serta dokumentasi (Simangusong, 2017).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Profil Pendidikan Wilayah Kecamatan Nita

Tingkat Pendidikan penduduk di Kecamatan Nita dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan**  
**Se-Kecamatan Nita Tahun 2023**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Usia 3-6 tahun yang belum sekolah	1.645	8,39
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ PG	662	3,38
3	Usia 7-17 tahun yang tidak pernah sekolah	27	0,14
4	Usia 7-17 tahun yang sedang sekolah	2.581	13,17
5	Usia 18 - 56 tahun yang tidak pernah sekolah	201	1,03
6	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SD	2.263	11,55
7	Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP	1.539	7,85
8	Usia 18- 56 tahun yang tidak tamat SLTA	1.010	5,15
9	Tamat SD/ Sederajat	3.499	17,85
10	Tamat SLTP/Sederajat	1.998	10,19
11	Tamat SLTA / Sederajat	2.971	15,16
12	Tamat D1 / Sederajat	24	0,12
13	Tamat D2 / Sederajat	66	0,34
14	Tamat D3 / Sederajat	363	1,85
15	Tamat S1 / Sederajat	680	3,47
16	Tamat S2 / Sederajat	69	0,35
17	Tamat SLB C	3	0,02
<b>Total</b>		<b>19.601</b>	<b>100</b>

Sumber: Kecamatan Nita, 2023

Pada tabel data di atas dapat disimpulkan bahwa persentase berdasarkan kelompok dengan pendidikan paling tinggi adalah Tamatan SD/Sederajat yaitu sebesar 17,85 %. Mayoritas penduduk di Kecamatan Nita memiliki akses pendidikan hanya sampai pada Tamatan SD/Sederajat dapat menjadi faktor terbatasnya akses terhadap informasi terkait gizi yang tepat serta sumber daya finansial yang kurang dalam mendukung terciptanya pola makan yang sehat.

### 3.2. Keadaan Ekonomi Wilayah Kecamatan Nita

Mata pencaharian penduduk di Kecamatan Nita dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Distribusi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**  
**Se-Kecamatan Nita Tahun 2023**

No	Pekerjaan/ Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	368	2,16
2	Buruh/Swasta	775	4,54
3	Pedagang	213	1,25
4	Petani	8.476	49,75
5	Ojek/Sopir	388	2,27
6	Pegawai Swasta	570	3,34
7	Wiraswasta	841	4,93
8	TNI/POLRI	14	0,08
9	Lain-Lain	5.391	31,64
<b>Total</b>		<b>17.036</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Kecamatan Nita, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Nita yaitu sebagai Petani dengan persentase sebesar 49,75 %.

### 3.3. Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka

Implementasi merupakan sebuah tahap dari suatu kebijakan atau peraturan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama di masa yang akan datang.

Menurut Imurana, Implementasi kebijakan ialah keberlanjutan dari sebuah masalah yang dirumuskan, diidentifikasi, sampai pada tahap pelaksanaannya (Anggara Setya Saputra et al., 2022). George Edward III dalam teori implementasinya mengemukakan bahwa dalam mencapai sebuah keberhasilan sebuah implementasi dipengaruhi oleh 4 aspek (Tangkilisan, 2003), antara lain:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka yaitu komunikasi yang efektif serta efisien baik antara para pelaksana kebijakan dengan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan dipilih dan dikembangkan, sebab tidak ada kebijakan yang sempurna karena akan selalu ada pihak yang merasa dirugikan walaupun setiap kebijakan yang ditetapkan pasti menguntungkan pihak banyak. Ini memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait pembagian tugas dan wewenang, serta antara Dinas Kesehatan dengan instansi terkait lainnya dan juga kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam hal ini Puskesmas Nita sebagai dasar implementasi kebijakan penanganan *Stunting*. Berdasarkan data yang penulis dapatkan selama melaksanakan penelitian dan magang di daerah yang berkaitan dengan komunikasi Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, terdapat 3 indikator penting terkait dengan teori komunikasi Implementasi dari George Edward III, yakni Transmisi, kejelasan dan konsistensi. Dalam wawancara dilakukan dengan Kepala UPT Puskesmas Nita pada saat melaksanakan wawancara yaitu Ibu Helmiana Robeti Luju Amd. Keb sebagai penerima kebijakan penanggulangan *stunting* menjelaskan bahwa:

Yang menjadi penyebab mengapa angka *stunting* di Kabupaten Sikka terkhususnya Kecamatan Nita meningkat salah satunya dikarenakan pemahaman masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk informasi terkait *stunting*, baik itu apa sebenarnya *stunting*, penyebab hingga ciri-ciri anak yang terkena *stunting* seperti apa masih sangat sedikit. Dikarenakan permasalahan *stunting* tidak hanya bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka saja, ataupun Puskesmas tiap wilayah kerja seluruh Kabupaten Sikka, melainkan juga membutuhkan kerja sama bersama sektor lain. Sehingga Puskesmas Nita bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, bekerja sama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa,

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Para Kader Pembangunan Manusia (KPM) tiap desa di Wilayah Kecamatan Nita sering melaksanakan sosialisasi terkait edukasi gizi, pola hidup sehat yang dilakukan secara periodik, berlokasi di Kantor Desa maupun Posyandu masing-masing desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa transmisi komunikasi terkait dengan kebijakan penanggulangan *stunting* yang dilakukan sudah terlaksana dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, Puskesmas, Posyandu dan Para Kader Pembangunan Manusia. Selain itu, melalui penjelasan dari Kepala UPT Puskesmas Nita Ibu Helmiana Robeti Luju, A.Md.,Keb pada wawancara yang dilaksanakan mengatakan bahwa:

Terkait penerapan kebijakan penanggulangan *stunting* dari Bupati Sikka, dari kami masih terus melaksanakan evaluasi dan sosialisasi rembuk *stunting* yang dilakukan setiap akhir bulan. Untuk lokasi kegiatan yaitu di Kantor Desa maupun Posyandu di seluruh wilayah kerja Puskesmas Nita. Selain itu juga, kami juga melakukan pelaporan kepada pihak dinas Kesehatan terkait segala perkembangan yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Nita. Sampai sekarang kami masih tetap berjalan rutin program PMT (pemberian makanan tambahan) kepada kelompok sasaran setiap harinya selama jangka waktu 6 bulan berjalan, pemberian obat cacing dan tablet tambah darah.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi dari implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

## **2. Sumber Daya**

Aspek berikutnya yang penting dalam implementasi adalah sumber daya karena menjadi salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi kebijakan. Sumber daya berkaitan dengan kemampuan dalam mempraktikkan kebijakan agar berjalan baik. Jika sumber daya memadai, maka proses implementasi kebijakan akan berjalan baik, begitu pun sebaliknya. Hal ini menjadikan sumber daya dalam proses implementasi kebijakan sebagai daya

dukung yang sangat dibutuhkan. Karena tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah dokumen di atas kertas saja. Berdasarkan teori implementasi yang digunakan penulis, aspek sumber daya dibagi menjadi 4 indikator, yaitu Staf, wewenang, informasi dan fasilitas.

Adapun data staf atau pegawai yang ada di Dinas Kesehatan dan seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sikka sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Kabupaten Sikka Tahun 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Dinas Kesehatan	UPT Laboratorium Kesehatan	UPT Puskesmas	Jumlah
<b>A.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>1.785</b>	<b>1.871</b>
1.	S2 Kesehatan Masyarakat	8	0	1	9
2.	S2 Ekonomi Kesehatan	1	0	0	1
3.	Dokter Umum	2	0	29	31
4.	Dokter Gigi	0	0	5	5
5.	S1 Kesehatan Masyarakat	9	0	66	75
6.	S1 Keperawatan	7	0	48	55
7.	S1 Farmasi / Apt	5	2	11	18
8.	S1 Gizi	0	0	6	6
9.	D4 Kebidanan	4	0	6	10
10.	D4 Kesehatan Masyarakat	2	0	0	2
11.	D3 Keperawatan	9	0	584	595
12.	D3 Kebidanan	10	0	746	756
13.	D3 Kesehatan Lingkungan	1	3	45	49
14.	D3 Gizi	3	0	55	58
15.	D3 Kefarmasian	7	3	38	48
16.	D3 Rekam Medik	0	0	30	30
17.	D3 Analisis Kesehatan	1	4	50	55
18.	D3 Elektromedik	2	0	3	26

19.	D3 Perawat Gigi	1	0	25	14
20.	D3 Fisioterapi	0	0	12	8
21.	D1 Kebidanan	0	0	8	11
22.	SPK	0	0	11	2
23.	SPRG	0	0	2	16
24.	SPPH	0	0	2	168
<b>B.</b>	<b>TENAGA NON KESEHATAN</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>121</b>	<b>168</b>
26.	S1 / D4	13	1	32	46
27.	D3	5	0	46	51
28.	SLTA	24	1	31	56
29.	SLTP	1	0	10	11
30.	SD	2	0	2	4
	<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>14</b>	<b>1.906</b>	<b>2.039</b>

Sumber : Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabuapten Sikka, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 2.093 SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, terdapat 92 % tenaga kesehatan dan 8% tenaga non kesehatan, dimana sebagian besar tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah menempuh pendidikan minimal D3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang menegaskan bahwa seorang tenaga kesehatan memiliki jenjang pendidikan minimal Diploma 3 dan ketentuan tersebut telah berlaku sejak tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data pegawai di atas, terkait dengan staf yang dimiliki, dapat disimpulkan bahwa staf atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kabupaten Sikka memenuhi kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan dapat membantu dalam proses implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. Selain itu, kewenangan yang diberikan oleh Bupati Sikka kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sebagai pelaksana dari Kebijakan, yang dimana

koordinasi dalam penggunaan kewenangan teruskan kepada staf masing-masing bidang terkait.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Disposisi merupakan aspek yang penting dikarenakan mempengaruhi dukungan maupun partisipasi yang dibutuhkan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut, karena membentuk bagaimana para pelaksana kebijakan dalam menginterpretasikan suatu kebijakan yang ditetapkan, baik diinterpretasikan secara positif maupun negatif sehingga mempengaruhi sikap para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut, karena ketika perspektif dan sikap implementor berbeda dengan pembuat kebijakan menyebabkan proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Terdapat beberapa indikator dalam aspek disposisi antara lain :

#### a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan dan pemilihan pelaksana kebijakan haruslah pada orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

#### b. Insentif

Insentif dalam hal ini merujuk pada stimulus yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan sehingga dapat memberikan motivasi tambahan, partisipasi yang lebih luas maupun keoptimalan para pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya orang bergerak pada kepentingannya



sendiri, sehingga insentif diadakan oleh para pemangku kebijakan untuk mempengaruhi tindakan dari para implementor, yaitu dengan cara menambah memberi penghargaan ataupun memberikan biaya tertentu sehingga memacu para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses implementasi kebijakan sebab berperan sebagai struktur organisasi yang mempunyai tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Ketika melaksanakan suatu tugas, dibutuhkan standar yang menjadi acuan untuk pelaksanaannya agar tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur penting karena memberikan langkah – langkah yang jelas dan terstruktur yang harus diikuti dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga berjalan secara konsisten dan sama. Terdapat 2 aspek yang penting dalam struktur birokrasi antara lain :

##### **a. Fragmentasi**

Fragmentasi merupakan pembagian tanggung jawab dari suatu kebijakan kepada beberapa badan atau pelaksana kebijakan sehingga membutuhkan koordinasi.

##### **b. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Ketika melaksanakan suatu tugas, dibutuhkan standar yang menjadi acuan untuk pelaksanaannya agar tidak melenceng dari aturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur penting karena memberikan langkah – langkah yang jelas dan terstruktur yang harus diikuti dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga berjalan secara konsisten dan sama.

### 3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Beberapa temuan utama yang diperoleh dari penelitian ini akan dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kesamaan dan perbedaan dalam konteks yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemerintah dalam penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita cukup efektif. Hal ini terlihat dari penurunan angka *stunting* dalam dua tahun terakhir. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Virgina Elvira Dey Putri (2023) Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang (Elvira Dey Putri, 2022) menyatakan bahwa Implementasi kebijakan percepatan penanggulangan *stunting* telah berjalan optimal. Kendala utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya ketersediaan SDM serta kondisi ekonomi maupun jenjang pendidikan yang diperoleh para orang tua menjadi penyebab peningkatan angka *stunting* di Kecamatan Nita, hal ini sejalan dengan temuan penelitian Anggara Setya Saputra., dkk. (2022) Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Purbalingga (Anggara Setya Saputra et al., 2022) menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang lemah termasuk masalah kemiskinan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan angka *stunting*.

## IV. KESIMPULAN

Penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka apabila merujuk pada 4 dimensi yang dikemukakan oleh George Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi telah dilaksanakan. Terdapat 3 indikator yang menunjukkan keberhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka yaitu landasan hukum yang kuat, terdapat dukungan anggaran serta kerja sama yang baik antar berbagai pihak. Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian, serta penelitian dilaksanakan hanya pada satu Kecamatan. Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, maka dari itu peneliti

menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan penanggulangan *stunting* di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan - CORE Reader.* (n.d.). Retrieved July 16, 2024, from <https://core.ac.uk/reader/596895890>
- Anggara Setya Saputra, Suryoto, S., & Chamid Sutikno. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Candra MKes(Epid), D. A. (2020). Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. In *Epidemiologi Stunting*. [https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=Awrwxw\\_53QaJhPmUA3w\\_LQwx.;\\_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1638052344/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F80670%2F1%2FBuku\\_EPIDEMIOLOGI\\_STUNTING\\_KOMPLIT.pdf/RK=2/RS=BFSY8aq0Lx1bha7MtII8PgwQwYU-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrwxw_53QaJhPmUA3w_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1638052344/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fprints.undip.ac.id%2F80670%2F1%2FBuku_EPIDEMIOLOGI_STUNTING_KOMPLIT.pdf/RK=2/RS=BFSY8aq0Lx1bha7MtII8PgwQwYU-)
- Damara, F. (2023). *STUNTING DI KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Elvira Dey Putri, V. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KECAMATAN ALAK KOTA KUPANG. *Community Development Journal*, 165.
- Febriyanti, L., & Harahap, R. A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Lampahan Kabupaten Bener Meriah. ... *Information: Jurnal ...*, 15, 1–10. <https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp/article/view/979>
- Kabupaten Sikka.* (n.d.). Retrieved July 10, 2024, from <https://www.sikkakab.go.id/1268-rakor-tpps--optimalisasi-penanggulangan-stunting-di-kabupaten-sikka>
- Kemendagri RI. (2020). Buku Juknis Aksi Konvergensi Stunting di Indonesia. *Kementerian Dalam Negeri*. <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>
- Materi Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.* (n.d.). Retrieved July 16, 2024, from <https://ayosehat.kemkes.go.id/materi-hasil-survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2022>
- Rahmanda, F. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) di Wilayah Kerja Puskesmas Pagar Jati*.
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Simangusong, F. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN PEMERINTAHAN* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Lukman Offset.
- UNICEF Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Indonesia 2022. *UNICEF Laporan Tahunan*

Indonesia 2022, 6.

[https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\\_Tahunan\\_UNICEF\\_Indonesia\\_2022.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Tahunan_UNICEF_Indonesia_2022.pdf)

BPS Kabupaten Sikka. (n.d.). Retrieved August 23, 2023, from <https://sikkakab.bps.go.id/>

